



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKHWAN ANTASARI
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 531815

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.523.250.000**

1. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 377.000.000
2. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 312 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 322.000.000
4. Tanah Seluas 11.375 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 109.250.000
5. Tanah Seluas 5.850 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2.246 m2/684 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 287.900.000**

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
2. MOBIL, TOYOTA JEEP FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 527.041.281**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.338.191.281

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.338.191.281

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.